

***THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, CLARITY OF BUDGET TARGETS,
AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON VILLAGE GOVERNMENT PERFORMANCE***

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA**

Oleh:

Padilah¹⁾, Sri Rahayu²⁾, Yudi³⁾

¹⁾*Konsultan Perorangan, Bidang Bina Marga Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo,
Jambi - Indonesia*

^{2&3)}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi - Indonesia*

Email: padilahidil@gmail.com¹⁾ sri_rahayu@unja.ac.id²⁾ yudi_fe@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

The purpose of this research is the effect of accountability, transparency, clarity of budget targets, and organizational commitment on village government performance (study of the Bungo District Village Government). The samples in the study were the Village Head, Village Secretary, Village Consultative Body (BPD) and Community Leader, amounting to 130 respondents. The data in this study are primary data. Hypothesis was tested by using multiple linear regression analysis with an SPSS software program. The results showed that Accountability and Organizational Commitment affected the performance of the village government, transparency and targets had no effect on the performance of the village government.

Key words: Public Accountability, transparency, Clarity of Target Budget, Organizational Commitment and Performanc.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi pada Pemerintah Desa Kabupaten Bungo). Sampel dalam penelitian yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat yang berjumlah 130 responden. Data dalam penelitian adalah data primer. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa sedangkan transparansi dan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Kata kunci: Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, Kinerja Pemerintah Desa.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan hierarki terendah pemerintahan dari negara kesatuan republik indonesia. Terminologi desa, berasal dari bahasa sanskerta yaitu deshi yang berarti “tanah kelahiran”. Dalam undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republik indonesia pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Desa berhak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri untuk memajukan perekonomian desa, membangun desanya masing-masing dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Sedangkan pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014. Menurut Medianti (2018) pemerintah desa bertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang di maksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam anggaran pendapatan belanja desa dengan dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Menjelaskan bahwa desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. maka sebagai tindak lanjut dari implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini, pemerintah melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) telah mengalokasikan dana desa. Dengan adanya dana desa yang di terima desa dari pemerintah pusat mulai tahun 2015, maka penerimaan desa mengalami peningkatan yang cukup besar, sehingga desa di tuntut untuk lebih akuntabel dalam mengelola keuangannya. Menurut kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI (2018) pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk sebuah program/kebijakan yang baru.

Berdasarkan data pada kementerian keuangan RI, jumlah dana desa yang telah di anggarkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 72,0 triliun. Pada tahun 2015, dana desa di anggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, dana desameningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta, di tahun 2017

kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, di tahun 2019 sebesar 70,0 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar 826,77 triliun dan tahun 2020 mengalokasi dana desa sebesar Rp 72 triliun atau naik Rp 2 triliun dari alokasi tahun lalu sebesar Rp 70 triliun. Sejak di alokasikan pada 2015, alokasi dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Selain dana desa tersebut sesuai, undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer lainnya berupa alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak, retribusi kabupaten/kota dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota (<https://kemendesa.go.id/>).

Dana Desa pada tahun 2018 di Kabupaten Bungo sebesar Rp.99.662.383.000, meningkat menjadi Rp.173.140.000.000, pada tahun 2021. Lebih lengkapnya perkembangan dana desa di Kabupaten Bungo dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Bungo

Tahun	Anggaran	Realisasi
2018	Rp 99.662.383.000	Rp 99.662.383.000
2019	Rp 114.776.496.000	Rp 114.776.496.000
2020	Rp 118.383.749.000	Rp 118.383.749.000
2021	Rp 173.140.000.000	Rp 173.140.000.000

Sumber: Diolah dari Data Dinas PMD Kabupaten Bungo, 2021

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Pada kenyataannya Realisasi penyerapan dana desa Kabupaten Bungo hingga 21 juli 2021 tergolong rendah yaitu 36,02% atau Rp. 62.360.000.000 dari pagu anggaran Rp. 173.140.000.000. Masih rendahnya realisasi serapan dana desa di Kabupaten Bungo dikarenakan banyak desa yang terlambat memenuhi syarat pencairan dana desa sebelumnya (<https://jambi.bpk.go.id>).

Kondisi tersebut memperlihatkan masih lemahnya pemahaman aparatur desa tentang laporan keuangan yang menyebabkan terlambatnya pelaporan keuangan desa. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan aparatur desa dalam tata kelolanya sehingga berpotensi terjadinya penyelewengan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukannya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa agar menjadi semakin akuntabel dan transparan (Kementerian Keuangan RI, 2016).

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Pemantauan dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kasus korupsi di desa melonjak naik tiap tahunnya. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. Korupsi di desa turut menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. *ICW* mencatat pada tahun 2015 kerugian mencapai Rp9,12 milyar. Pada tahun 2016, kerugian mencapai Rp8,33 milyar dan pada tahun 2017, kerugian melonjak menjadi Rp30,11 milyar. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor desa mencapai Rp47,56 (*ICW*, 2018).

Beberapa kasus Pengelolaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Bungo yaitu masih dijumpai kegiatan yang belum tepat sasaran. Salah satu desa mengalokasikan dana desa untuk perbaikan pembangunan jembatan yang merupakan jembatan satu-satunya akses warga ke ladang, pengalokasian perbaikan pembangunan jembatan sudah dianggarkan melalui dana desa (DD) tahun 2019, tapi hingga akhir tahun 2019 perbaikan pembangunan jembatan tidak kunjung diperbaiki (*Sidakpost.id*). Penggunaan dana desa untuk Pekerjaan pembukaan dan perkerasan bersumber dari anggaran Dana Desa tahun 2019. Namun dalam pekerjaan tersebut ada pengelolaan anggaran yang tak dapat dipertanggung jawabkan hingga menjadi temuan yang merugikan keuangan negara 354 juta rupiah. Terdapat juga Perangkat desa yang menggunakan uang desa sebesar Rp 496 juta lebih untuk kepentingan pribadi. Hal ini diakui dalam sidang pemeriksaan terdakwa dugaan korupsi APBDus Dusun Air Gemuruh tahun anggaran 2018 dan 2019. (*kejaksaan.go.id*).

Fenomena yang terjadi di beberapa Desa di Kabupaten Bungo masih ditemukan permasalahan berupa penyalahgunaan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Bungo dalam penggunaan dana desa oleh beberapa Rio. Hal ini disebabkan bahwa rendahnya pemahaman dari aparat pemerintahan desa di Kabupaten Bungo dalam pengelolaan dana desa secara optimal, sehingga dianggap perlu memperbaiki kembali penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya. Masalah tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih minimnya pemahaman sumber daya aparat untuk mengelola laporan hasil pengelolaan dana desa, serta dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa kurang sosialisasi kepada masyarakat tentang prioritas penggunaan dana desa, sehingga muncul kesalahpahaman karena ketidaktahuan dari masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang tidak sesuai perencanaan. Padahal peran serta masyarakat menjadi indikator penting dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, diperlukan akuntabilitas,

transparansi dan komitmen organisasi yang tinggi untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa (*Larastika Medianti*, 2018). Selain itu sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan (*Suhartono dan Mochammad*, 2006).

Pengelolaan dana desa yang baik, aparat pemerintah desa yang terkait harus memiliki Komitmen organisasi sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada satu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi juga dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi (*Robbins dan Judge*, 2008).

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut (*Kenis*, 1979) dalam (*Bangun*, 2009). Adanya sasaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidak jelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja (*Famela*, 2016).

Peneliti melakukan replikasi dari penelitian yang dilakuakn oleh famela (2016) dan ari (2020) karena masih adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian famela (2016) menunjukkan adanya pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Sedangkan dalam penelitian ari (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja dan variabel transparansi, sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.

Variabel penelitian sebelumnya masih dipertahankan dalam penelitian ini dikarenakan terdapat kesenjangan hasil dari penelitian sebelumnya. Pemilihan objek dalam penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.
2. Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.
3. Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.
4. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya pemahaman mengenai berbagai konsep yang berkaitan dengan pemerintah desa.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bungo.
3. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya akuntabilitas, transparansi dan kejelasan sasaran terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.
4. Bagi Peneliti, diharapkan dapat mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari akuntabilitas, transparansi dan kejelasan sasaran terhadap kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Theory Agency diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menyatakan bahwa hubungan agensi adalah kontrak di mana satu atau lebih menyerahkan wewenang kepada orang lain untuk kepentingan mereka. Masalah hubungan agensi ini menghasilkan informasi asimetris dan konflik kepentingan. Teori agensi digunakan dalam penelitian ini karena adanya keterkaitan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana surplus pembiayaan dan hubungan antara masyarakat yang diwakili oleh kepada pemerintah daerah (agen). Adanya pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada otoritas pemerintah daerah untuk mengatur secara bebas semua kegiatan pemerintah di wilayahnya. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari delegasi otoritas pemerintah pusat untuk menurunkan anggaran surplus pembiayaan yang tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam pembiayaan kebutuhan administrasi harian dan memberikan layanan

publik yang lebih baik kepada masyarakat. Keterkaitan teori agensi dengan penelitian ini mengacu kepada hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

2.2. Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Republik Indonesia (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban atas dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi. terhadap pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban.

2.3. Transparansi

Pemerintahan yang bersih adalah salah satu tujuan atau ekspektasi dari *Good Governance*, selain pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan prinsip keterbukaan atau yang dinamakan transparansi. (Mardiasmo, 2002) menjelaskan bahwa transparansi berarti pemerintah secara terbuka memberikan informasi tentang kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut, termasuk informasi tentang keuangan serta informasi yang akan dapat digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pentingnya prinsip transparansi lebih dikuatkan melalui UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di dalamnya menjelaskan azas keterbukaan (transparansi) pada penyelenggaraan pemerintah daerah, azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

2.4. Kejelasan Sasaran Anggaran

Anthony dan Govindarajan (2006) mendefinisikan penganggaran sebagai alat perencanaan penting untuk mengendalikan kinerja jangka pendek dalam organisasi. Anggaran operasi biasanya mencakup satu tahun dan menguraikan pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan untuk tahun tersebut.

2.5. Komitmen Organisasi

2.5.1. Pengertian Komitmen Organisasi

Griffin, (2004) komitmen organisasi adalah "suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengetahui dan terhubung dengan organisasinya". Robbins, (2008) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai "tingkat kepercayaan bahwa seorang karyawan mendukung organisasi tertentu untuk tujuan mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu". Lebih lanjut Zainuddin (2002) menyatakan "komitmen organisasi sebagai kekuatan relatif individu menentukan partisipasinya dalam bagian-bagian organisasi". Berdasarkan beberapa pendapat

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan komitmen organisasi adalah sikap individu yang berhubungan dengan organisasi tempatnya bekerja secara konsisten.

2.5.2. Komponen Komitmen Organisasi

Meyer, Allen, dan Smith dalam Soekidjan (2009), mengemukakan tiga komponen komitmen organisasional, yaitu:

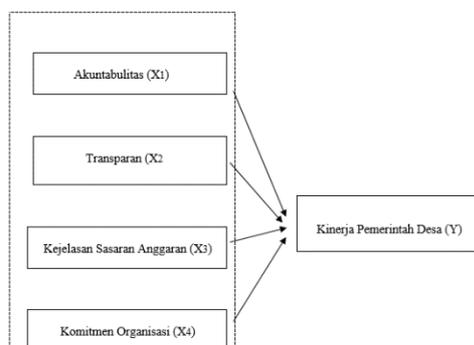
1. *Affective commitment*, terjadi ketika karyawan ingin menjadi bagian dari suatu organisasi karena hubungan emosional.
2. *Continuance commitment*, terjadi ketika karyawan tinggal dengan organisasi karena mereka membutuhkan gaji dan tunjangan lainnya, atau karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan lain.
3. *Normative commitment*, timbul dari nilai yang ada dalam diri karyawan. Karyawan tetap menjadi anggota organisasi karena mereka sadar bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan sesuatu yang perlu dilakukan.

2.6. Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja berasal dari kata *performance*, yang diartikan sebagai suatu hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah eksekusi dari rencana yang telah disiapkan. Kinerja yang efektif dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kemampuan, motivasi, dan kepentingan (Wibowo, 2007). Widodo (2005) Kinerja terdiri dari melaksanakan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab seseorang dengan hasil yang diharapkan atau pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang atau kelompok orang dari suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi yang relevan dengan cara yang sah, legal, dan etis.

2.7. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model hubungan antar variable, ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Sumber: data diolah, 2022

Gambar 1. Model Penelitian

Keterangan:

- > : Pengaruh Parsial X terhadap Y
- > : Pengaruh Simultan X terhadap Y

2.3. Hipotesis

- H1: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo
- H2: Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo.
- H3: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap pemerintah desa Kabupaten Bungo.
- H4: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kabupaten Bungo

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka untuk menjelaskan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi yang dilihat. Tujuan penelitian ini dibatasi dengan menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya (Syamsudin dan Damayanti, 2011). Sekaran, (2010) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk tujuan menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada subjek atau area yang diteliti kemudian menjelaskan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian yang sederhana apa adanya.

3.2 Objek Penelitian

Sekaran, (2010) berpendapat bahwa objek penelitian adalah bidang yang digeneralisasikan yang mencakup objek dan subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang diidentifikasi oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan akhirnya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Bungo.

3.3 Populasi dan Sampel penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang meliputi: objek/subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sekaran, 2010). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat yang dimiliki oleh populasi. Pengukuran sampel adalah langkah yang menentukan besar kecilnya sampel yang diambil ketika melaksanakan penelitian pada suatu objek. Untuk menentukan ukuran sampel dapat dilakukan secara statistik atau berdasarkan perkiraan penelitian. mewakili (*representatif*).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012) *purposive sampling* adalah teknik sampel yang

digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa di Kabupaten Bungo yang berjumlah 564 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Tokoh Masyarakat pada 141 Desa di Kabupaten Bungo.

Sampel merupakan sebagian perwakilan populasi yang akan diteliti. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil sebanyak 130 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota Badan Permusyawaratan (BPD), dan Tokoh Masyarakat. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *Nonprobability Sampling*, yaitu dengan *Purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria yang dimaksud antara lain:

- a. Telah bekerja pada Pemerintah Desa selama minimal 1 tahun, agar dapat lebih memahami tentang kondisi dan karakteristik di masing-masing desa.
- b. Pernah mengikuti kursus/diklat/bimbingan teknis/sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa.
- c. Terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa.

3.4 Operasional Variabel

Variabel penelitian ini meliputi variable Dependen dan independen. Variabel independen terdiri dari variabel akuntabilitas, transparansi, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi. Variabel Dependen adalah Kinerja Pemereintah Desa Kabupaten Bungo. Operasionalisasi variabel penelitian digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban realisasi Anggaran organisasi terhadap masyarakat luas.	1.Penganggaran 2.Program 3.Manajerial 4.Manfaat 5.Horizontal 6.Perencanaan 7.Proses 8.Hukum 9.Kuangan 10.Kebijakan 11.Tepat waktu	Likert
Tranparansi	Memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, termasuk informasi tentang keuangan serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.	1.Kegiatan pencatatan kas dapat diakses. 2. Laporan realisasi difokan kepada masyarakat. 3..Akses yang mudah untuk memperoleh dokumen publik. 4. akses untuk informasi perencanaan 5. Terbuka hasil pelaksanaan program. 6. Mengakomodasi dan meningkatkan aspirasi/usulan rakyat 7. Kebijakan Pemerintah Desa. 8. Meningkatkan transparansi. 9. Penyediaan informasi yang bertanggung jawab. 10. Laporan keuangan Pemerintah Desa diterbitkan secara periodik.	Likert
Kejelasan Sasaran Anggaran	Realisasi anggaran untuk masyarakat secara jelas dan transparan sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan	1. kejelasan sasaran anggaran pada satuan kerja 2. spesifikasi sasaran anggaran pada satuan kerja 3. Tingkat kepentingan sasaran anggaran pada setiap program. 4. outcome yang harus dicapai pada setiap progam. 5. Skala prioritas 6. kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur 7. Diuraikan secara jelas,sehingga dapat memahaminya dengan yakin 8. sasaran anggaran tidak membingungkan 9. Tujuan	Likert
Komitmen organisasi	Identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi.	1.keinginan untuk bekerja keras. 2 memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan organisasi 3.semangat menyelesaikan tugas 4.bertahan dalam perusahaan merupakan kenutuhan 5. merasa memiliki keterlibatan dalam mencapai tujuan 6. upaya yang sangat keras dalam menyelesaikan tugas.	Likert

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		7. membanggakan perusahaan kepada oranglain. 8. peluang yang terbaik bagi saya dalam mengingatkan kinerja organisasi 9.pertimbangan keluar dari organisasi	
Kinerja	Hasil dari proses aktivitas yang efektif mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaporan, pengawasan, penatausahaan dan staffing	1. tanggung jawab pada setiap tugas 2. disiplin yang harus dimiliki 3. Kemampuan dalam melakukan kerja sama dengan aparat lain 4. Nilai-nilai kejujuran 5. inisiatif dalam pengambilan keputusan. 6. pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. 7. memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan 8. Pentingnya tanggung jawab pada setiap tugas yang dilakukan selaku aparat desa 9. Hasil kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. 10. Memiliki inisiatif dalam membantu penyelesaian pekerjaan yang lebih baik.	

Sumber: Data Diolah, 2022

3.5 Sumber Data dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui investigasi lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data primer (Sugiono, 2015). Data primer menunjukkan keaslian informasi yang terkandung di dalam data tersebut (Abdillah & Jogiyanto, 2015).

Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data yang berisi daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa lembar kuesioner dengan 5 alternatif jawaban, data yang diperoleh berupa data interval yang terdiri dari jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), cukup setuju (CS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

Tingkat keyakinan seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang mgkat keyakinan seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara dan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu".

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diuji validitas dan reliabilitasnya, selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap model statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi berganda (multiple regressin). Analisis regresi berganda ini diolah dengan menggunakan program SPSS for windows versi 24.0. Dalam sebuah penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi cukup sering adalah dalam menyesuaikan model prediktif dengan model yang dimasukkan ke dalam rangkaian data.

Kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi cukup sering dalam mencocokkan model

prediktif kedalam sebuah model yang dimasukkan ke dalam serangkaian data.

$$Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pemerintah Desa

A = Konstanta

B1= Koefisien regresi akuntabilitas

B2= Koefisien regresi transparansi

B3= koefisien regresi komitmen organisasi

B4= Koefisien regresi komitmen organisasi

X1= Akuntabilitas

X2= Transparansi

X3= Kejelasan sasaran anggaran

X4= Komitmen organisasi

E= error

3.7 Teknik Skala Pengukuran

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sekaran (2010). Skala Likert pada penelitian ini menggunakan 5 alternatif jawaban. Skor yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Skor 1 yaitu untuk jawaban sangat tidak setuju.
- Skor 2 untuk jawaban tidak setuju.
- Skor 3 untuk jawaban biasa saja.
- Skor 4 untuk jawaban setuju.
- Skor 5 untuk jawaban sangat setuju.

3.8 Uji Kualitas Data

Penelitian mengukur variabel dengan menggunakan alat kuesioner harus memeriksa kualitas

data yang diperoleh, bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel karena keaslian data yang diolah akan menentukan hasil penelitian.

Valid artinya alat instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang andal (*reliable*) adalah instrumen yang ketika digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama, menghasilkan data sama, Sekaran (2010). Oleh karena itu, pengujian validitas dan realibilitas penting dalam suatu penelitian.

3.8.1 Uji Validitas Data

Data kuesioner dapat dinilai valid jika pertanyaan dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner yang terkait. Validitas dari pertanyaan dalam kuesioner dapat diukur dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Nilai *Correlated item-Total correlation* dibandingkan dengan hasil perhitungan r table. pertanyaan atau indikator dinyatakan valid jika r hitung $> r$ table (Ghozali, 2011).

3.8.2 Uji Reliabilitas

Tujuan utama dilakukan uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument apabila instrument tersebut digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden (Sekaran, 2010). Hasil uji reliabilitas mencerminkan apakah suatu instrumen penelitian dapat dipercaya tergantung pada seberapa stabil dan akurat instrumen tersebut dalam arti pengukuran yang dihasilkan merupakan pengukuran yang akurat dari instrumen tersebut.

3.9 Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi dapat dilakukan setelah dipenuhi syarat lolos dari asumsi klasik. Uji asumsi klasik untuk analisis regresi dalam penelitian ini meliputi:

3.9.1 Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk memastikan apakah dalam suatu model regresi, variabel gangguan atau variabel residual berdistribusi normal. Analisis grafis dan pengujian statistik merupakan dua cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal. Distribusi normal akan membentuk diagonal lurus dan histogram dari data yang tersisa akan dibandingkan dengan diagonal. (Ghozali & Laten, 2012).

Uji normalitas dengan grafik harus dilakukan dengan hati-hati karena secara visual akan terlihat normal, tetapi secara statistik bisa sebaliknya. Oleh karena itu disarankan selain untuk uji grafis, juga dilengkapi untuk uji statistik. Uji statistik sederhana yang dapat digunakan untuk memeriksa normalitas residual adalah uji statistik non parametrik.

3.9.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan menentukan apakah model regresi dapat menemukan korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali & Laten, 2012). Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan cara Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $\text{tolerance} < 0.10$ atau sama dengan nilai $\text{VIF} > 10$.

3.9.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat varians yang tidak sama antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Untuk menguji ada tidaknya dalam uji heterokedastisitas, dapat dilihat dari scatter plot. Jika terdapat angka keteraturan, itu menunjukkan bahwa telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada sampel yang jelas dan titik-titik berada di atas dan di bawah 0 dan sumbu Y, maka tidak ada varians variabel. (Ghozali & Laten, 2012).

3.10 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Jika terdapat deviasi antara sampel yang ditentukan dengan jumlah populasi maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan antara menolak maupun menerima suatu hipotesis.

Untuk menguji hipotesis mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan dan parsial, berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, digunakan pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t.

3.10.1 Uji F

Uji statistik F untuk menjawab rumusan masalah no 1 pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dianalisis dengan menggunakan uji F, yaitu dengan memperhatikan signifikansi nilai F pada output perhitungan dengan tingkat alpha 5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian menurut Ghozali & Laten (2012):

- Jika probabilitas signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).
- Jika probabilitas signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).

3.10.2 Uji t

Uji t untuk menjawab rumusan masalah no 2, 3 dan 4 digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat diterapkan pada populasi (dapat digeneralisasikan). Uji-t menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Perhitungan yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yang dirumuskan, yaitu dengan melihat signifikansi (*p-value*) masing-masing variabel bebas dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Kriteria pengujian menurut Ghozali & Laten (2012):

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (H_0)
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis diterima (H_a)

Mencari besarnya t_{hitung} dengan rumus :

$$t_i = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Keterangan:

t_i : Nilai t_{hitung} masing-masing variabel bebas

β_i : Koefisien regresi masing-masing variabel bebas

$S\beta_i$: Standar error masing-masing variabel bebas

3.10.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa baik suatu model dapat menjelaskan varians dari variabel dependen. Nilai koefisien yang kecil berarti daya penjas variabel terikat terhadap variabel bebas sangat terbatas. Nilai angka yang mendekati angka 1 berarti bahwa variabel bebas menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel terikat. Hasil $R^2 = 0,67$ menunjukkan bahwa model kuat; $R^2 = 0,33$ menunjukkan kekuatan sedang dan $R^2 = 0,19$ menunjukkan kekuatan rendah atau lebih rendah (Ghozali & Laten, 2012).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Koefisien regresi (b_1) = 0,235, jika variabel Akuntabilitas (X_1) ditingkatkan 1 satuan maka Kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,235 dengan asumsi

variabel independen lainnya bernilai tetap. Hasil perhitungan dari uji t untuk Akuntabilitas (X_1) yang menghasilkan nilai $t_{hitung} = 2,595$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,011. Karena $t_{hitung} 2,595 > 1,98969$ dan nilai signifikansi sebesar 0,011 menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan demikian dapat dimaknai dengan adanya akuntabilitas, pemerintah desa Kabupaten Bungo bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah desa dapat dinilai dari kontribusi jawaban responden yang menggambarkan tingkat akuntabilitas di Kabupaten Bungo berada dalam kriteria tinggi (baik).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Famela, (2016), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajemen, karena dengan adanya pertanggungjawaban publik, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui anggaran tersebut tetapi juga dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

4.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Hasil uji statistik menunjukkan Transparansi (X_2) memiliki tingkat signifikan 0,854 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,672 lebih besar dari $t_{tabel} 1,98969$ Artinya transparansi tidak berpengaruh dengan kinerja pemerintah desa. Kurangnya transparansi di pemerintahan desa dari mulai proses penganggaran sampai laporan penggunaan dana mengakibatkan kinerja yang dilakukan pemerintah desa kabupaten bungo diragukan oleh masyarakat.

Berdasarkan karakteristik Responden terdapat 20% dari 92 responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA, sehingga pengetahuan responden terkait transparansi masih terbatas dan masih minim dilakukan pelatihan sehingga dapat mempengaruhi hipotesis yang di uji.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Bahkan transparansi tidak membawa dampak atau pengaruh positif kepada tata pemerintahan desa serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Rendahnya tingkat transparansi dalam bentuk kurangnya sosialisasi terhadap berbagai produk hukum akan membuat pelanggaran hukum meningkat karena masyarakat tidak mengetahui berbagai peraturan perundangan yang

mengatur kehidupan mereka. Melalui transparansi akan terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan modal yang penting untuk berjalannya pemerintahan.

4.3. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Hasil uji statistik menunjukkan Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) memiliki tingkat signifikan 0,979 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan dengan nilai t hitung sebesar 0,184 lebih kecil dari t tabel 1, 98969 Artinya Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh dengan kinerja pemerintah desa. Berdasarkan karakteristik Responden terdapat 20% dari 92 responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA, sehingga pengetahuan responden terkait kejelasan sasaran anggaran masih terbatas dan masih minim dilakukan pelatihan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ari (2020) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa disebabkan kurang tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang dianggap mampu mengelola anggaran secara baik. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Famela (2016) dan Sonia (2019) menemukan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Famela (2016), menyatakan kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.

4.4. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Pada hasil uji statistik variabel komitmen organisasi memiliki tingkat signifikan 0,000 lebih dari kecil $\alpha = 0,05$ dan dengan nilai t hitung sebesar 8,034 lebih besar dari t tabel 1, 98969 serta koefisien regresi bernilai positif maka H_a diterima sehingga variabel komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Famela (2016) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan. Komitmen organisasi yang tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja yang tinggi, tingkat absensi berkurang, dan meningkatnya loyalitas karyawan pada organisasi. Robbins (2006:229) berpendapat bahwa apabila seseorang berkomitmen terhadap sasaran/tujuan organisasi, artinya ia bertekad untuk tidak meninggalkan sasaran organisasi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa Kabupaten Bungo. Hal ini menunjukkan akuntabilitas yang tinggi sangat menunjang kinerja pemerintah desa di Kabupaten Bungo.
2. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Bungo. Hal ini dikarenakan kurangnya transparansi di pemerintah desa dari proses penganggaran hingga pelaporan penggunaan dana desa mengakibatkan kinerja pemerintah desa diragukan oleh masyarakat.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Bungo. Hal ini disebabkan kurang tersedianya SDM yang dianggap mampu mengelola anggaran secara baik.
4. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Bungo. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi, maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa di Kabupaten Bungo.

5.2 Saran

Saran untuk dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa Kabupaten Bungo.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data penelitian sehingga sangat mungkin menimbulkan kekeliruan dalam pengukurannya karena jawaban dari responden belum tentu dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
2. Pada penelitian ini, masih banyak variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Variabel lain yang juga mungkin mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Seperti variabel gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja.

DAFTAR REFERENSI

Medianti, Larastika. (2018). Kompetensi Aparatur,

- Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JOM FEB*, Volume 1 Edisi 1.
- Agus Suma Arta, I. M., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 709.
- Andrianto, N. (2007). *Good e-government : transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Bayumedia.
- Daulay, A. F. (2015). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Keuangan, Dan Pengawasan Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Suiuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Famela. (2016). dan Eka Hariyani. pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar 3(1).
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Griffin, R. . (2004). *Komitmen Organisasi. Terjemahan*,. Erlangga.
- Hanafiah, R. R. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Hidayat, T. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi Dan Locus of Control Terhadap Kinerja Manajerial. *Akuntabilitas*, 8(2), 148–161. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i2.2769>
- ICW. (2018). *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 1(20), 1–10.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2016). 4(1), 1–23.
- Kenis. (1979). *Effects on Budgetary Goal 5Characteristic on Managerial Attitude and Performance, The Accounting Review*.
- Liper Siregar. (2011). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar*.
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12, 129–144.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Kedua). Andi.
- Munawar, G. I. dan N. (2006). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*. 23–26.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Dua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Puspasari, N. (2015). Fraud Theory Evolution and Its Relevance To Fraud Prevention in the Village Government in Indonesia*. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(2), 177.
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. UMMPress.
- Riduwan. (2012). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta.
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku organisasi* (Edisi 12). Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2010). *Research for business methods for business* (1 and 2). Salemba Empat.
- Subiantoro, M. H., & Pituringsih, E. (2018). The Embezzlement Of Village Budget By Apparatus : A Case Study In East Lombok District Of West Nusa Tenggara Province , Indonesia. *Global Journal of Advanced Research*, 1, 17–25.
- Sugiono. (2015). *Statistik Nonparametris Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1), 1–94.
- Suhartono, E., & Solichin, M. (2006). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. 0274, 1–20.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan*

Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten atau Kota Induk Provinsi Papua. Deepublish.

Syafrial. (2009). *Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.* Universitas Sumatera Utara.

Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa.* Gava Media.

Winarni, E. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 271–282.

wiratna Sujarweni, V. (2015). *Akuntansi desa : tata keuangan kelola desa* (Mona (Ed.)). Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.